

**KEBIJAKAN REDAKSIONAL SKH KEDAULATAN RAKYAT DALAM
MENENTUKAN BERITA UTAMA (HEADLINE NEWS)
EDISI 1 JUNI – 31 AGUSTUS 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam
(S.Kom.I)**

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD SAFRODIN
NIM. 05210049**

Pembimbing:

- 1. Drs. Hamdan Daulay, M.Si**
NIP. 19661209 199403 1 004
- 2. Dra. Evi Septiani TH, M.Si**
NIP. 19640923 199203 2 001

**FAKULTAS DAKWAH
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2010**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Sdr Muhammad Safrodin

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengarahkan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Safrodin

NIM : 05210049

Judul Skripsi : KEBIJAKAN REDAKSIONAL SKH KEDAULATAN RAKYAT DALAM
MENENTUKAN BERITA UTAMA (HEADLINE NEWS) EDISI 1
JUNI – 31 AGUSTUS 2009.

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah, Jurusan/Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Komunikasi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Februari 2010

Pembimbing I

Drs. Hamdan Dasray, M.Si

NIP. 19661209 199403 1004

Pembimbing II

Dra. Evi Septiani TH, M.Si

NIP. 19640923 199203 2001



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/461/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**KEBIJAKAN REDAKSIONAL SKH KEDAULATAN RAKYAT
DALAM MENENTUKAN BERITA UTAMA (HEADLINE NEWS)
EDISI 01 JUNI 2009 - 31 AGUSTUS 2009**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Safrodin

NIM : 05210049

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 17 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : B+

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Pembimbing I

Drs. Hamdan Daulay, M.Si.
NIP. 19661209 199403 1 004

Pembimbing II

Dra. Hj. Evi Septiani, M.Si.
NIP. 19640923 199203 2 001

Pengaji I

Drs. Moh. Sahlap, M.Si.
NIP.19680501 199303 1 006

Pengaji II

Khoiro Ummatn, S.Ag.,M.Si.
NIP. 19710328 199703 2 001

Yogyakarta, 22 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Dakwah

Bekan

Prof. Dr. Haji Bahri Ghazali, MA
NIP. 19561223 198503 1 002

Motto

“Bismillaahirrahmaanirrahiim”

Halaman Persembahan

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

Ibunda tercinta yang darahnya mengalir kala melahirkanku

Ibunda tercinta yang telah memberiku air kehidupan

Ibunda tercinta yang menitikkan air matanya saat mendoakanku

*Ayahanda, semoga tiap peluh keringat yang kau teteskan, menjelma menjadi
Rahmat yang menggiringmu ke Surga Allah, kelak.*

Adik (Nurul Hidayati) dan Kakak (Samsul Ariyadi)

Si Permata Hati (Mustainah, S.Si)

Segenap rekan, sahabat, handai taulan baik yang jauh maupun dekat.

Semoga Allah mem-barokahi kehidupan kita, Amiin.

ABSTRAKSI

Kebijakan redaksional bisa dimaknai sebagai serangkaian pedoman yang menjadi dasar di bidang redaksional sesuai visi dan misi media massa yang bersangkutan. Kebijakan redaksional, di samping berkaitan dengan substansi pemberitaan, juga meliputi tujuan mengapa berita tersebut diturunkan. Sebuah berita utama (*headline news*) dalam surat kabar harian, merupakan laporan utama di setiap edisinya. Dalam perspektif ini, berita utama tentu punya nilai berita yang paling tinggi di antara sekian berita yang masuk ke meja redaksi.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengkaji bagaimana kebijakan yang berlaku di SKH Kedaulatan Rakyat kaitannya dalam menentukan berita utama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah berita-berita utama SKH KR edisi 1 Juni – 31 Agustus 2009, dokumentasi dan wawancara langsung dengan pemimpin redaksi SKH KR dan beberapa redaktur lainnya. Analisis yang digunakan adalah dengan menyederhanakan data ke bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Fokus penelitiannya adalah untuk mengkaji bagaimana kebijakan SKH KR di bidang redaksional dalam menentukan berita utama keesokan harinya.

Dari penelitian yang sudah diupayakan, diperoleh fakta bahwa kebijakan redaksional SKH KR dalam menentukan berita utama pada dasarnya mengacu pada konsep nilai berita. Meskipun demikian, nilai berita dalam pandangan redaksi KR tidak sama persis dengan nilai berita dalam kaidah-kaidah jurnalistik. Di samping itu, berita-berita utama SKH KR dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu. Dalam arti, suatu berita utama tidak hanya berupa pelaporan fakta atau peristiwa berita saja, akan tetapi ada maksud yang ingin disampaikan seperti berupaya untuk mengawal dinamika bangsa Indonesia, untuk membela kepentingan rakyat tertindas dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله و صحبه اجمعين
امانع.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas luapan rahmat, taufiq, kemudahan dan kelancaran dalam proses penggerjaan karya sederhana ini hingga selesai. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi berjudul *Kebijakan Redaksional SKH Kedaulatan Rakyat dalam Menentukan Berita Utama (Headline News) Edisi 1 Juni – 31 Agustus 2009* ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memeroleh gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I) di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ini menjadi salah satu bentuk pembelajaran.

Dalam penyusunan risalah ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah memberi dukungan, baik moral maupun materiil. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. M Bahri Ghazali, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dra. Hj. Evi Septiani TH, M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merangkap pembimbing skripsi yang telah banyak direpotkan oleh penulis.
4. Drs. Hamdan Daulay, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus pembimbing akademik. Terima kasih atas segala bimbingan, kritik dan sarannya selama ini. Maaf, saya banyak mencuri ilmu Bapak.
5. Semua staf pengajar di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak perlu disebutkan satu persatu. Semoga ilmu dan keikhlasan yang telah diberikan, menjadi amal *jariyah* yang tak terputus-putus pahalanya.
6. Ibunda Hj. Turiyah dan Ayahanda H. Marzuqi. Hanya Allah-lah dzat yang Maha Sebaik-baiknya Pemberi Balasan. Juga kepada Dik Nurul dan Kang Ari sebagai sponsor utama berupa semangat, kemesraan dan "kesetiakeluargaan".
7. Rekan-rekan "*Sindikat Penulis Jogja*" (Pakdhe Agus Wibowo sekalian, Pak Ali Usman sekalian, Pak Benni Setiawan sekalian). Juga kepada sedulurku Bramma Aji Putra yang menjadi rival sekaligus sahabat terbaik, Anton Prasetyo, Andi Andrianto dan semua rekan yang mendaulatkan diri sebagai hamba pena.
8. Seseorang yang akan menjadi calon ibu dari anak-anakku, Musta'inah, S.Si Binti Basri. Untuk sebuah hubungan pertemanan indah ini, kuucapkan terimakasih yang tidak terputus-putus.
9. Para redaktur surat kabar yang telah merelakan sebagian ruangan korannya untuk menampung "uneg-uneg" penulis. Juga kepada beberapa redaktur SKH

Kedaulatan Rakyat, Pak Octo, Pak Hudono, Pak Luthfie dan Pak Arwan yang kesibukan rapatnya harus terganggu oleh penulis.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan, baik material maupun spiritualnya selama ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata "layak". Keterbatasan waktu, pikiran, tenaga, biaya dan sebagainya membuat karya ini masih perlu "tambal sulam" di sana-sini. Karena itu, kritik dan saran yang konstruktif selalu penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya dan menjadi inspirasi bagi diskusi dan penelitian, khususnya dalam bidang kajian media berikutnya.

Yogyakarta, 4 Maret 2010

Muhammad Safrodin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah	1
B. Latar Belakang	3
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Telaah Pustaka	7
G. Kerangka Teoritik	10
H. Metode Penelitian	24

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN REDAKSIONAL SKH KEDAULATAN RAKYAT

A. Gambaran Umum	29
B. Profil Berita Utama SKH KR	38

BAB III TELAAH KEBIJAKAN REDAKSIONAL SKH KR

DALAM MENENTUKAN BERITA UTAMA

A. Cara Kerja Penentuan Berita Utama (<i>Headline News</i>) SKH KR	40
B. Identifikasi Berita Utama SKH KR.....	45
C. Meninjau Kebijakan Redaksional SKH KR Terkait Penentuan Berita Utama	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
C. Kata Penutup	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah

Dalam upaya memahami skripsi yang berjudul “Kebijakan Redaksional SKH Kedaulatan Rakyat dalam Menentukan Berita Utama (*Headline News*) Edisi 1 Juni – 31 Agustus 2009”, maka perlu kiranya diberi penegasan istilah terlebih dahulu. Penegasan ini dimaksudkan untuk memberi batasan makna terkait judul skripsi di atas. Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Kebijakan Redaksional

Menurut arti bahasa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.¹

Sedangkan redaksional merupakan istilah dari sisi ideal penerbitan pers yang menjalankan visi, misi atau idealisme media yang mengurus tentang pemberitaan mulai dari peliputan, penulisan hingga penyuntingan

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hal. 149.

berita.² Redaksional juga bisa dimaknai sebagai penyusunan kata-kata dalam suatu kalimat yang dibuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketertarikan pembaca.³

2. SKH Kedaulatan Rakyat

SKH adalah kependekan dari surat kabar harian. SKH sebagai istilah yang dipakai bagi usaha penerbitan pers dalam bentuk surat kabar/koran yang terbit setiap hari. Menurut Totok Djuroto, surat kabar adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran plano, terbit teratur, bisa setiap hari atau setiap minggu.⁴ Sedangkan Kedaulatan Rakyat adalah nama sebuah surat kabar harian yang berlokasi di Yogyakarta, terbit tiap hari dan mempunyai pangsa pasar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya.

3. Berita Utama (*Headline News*)

Media massa surat kabar selalu terdapat berita utama (*headline news*) di setiap edisinya. Berita utama merupakan berita terpenting dalam terbitan pada hari tersebut.⁵ Berita utama adalah berita yang keberadaannya memungkinkan berita-berita lain yang diliput pada hari

² Septiawan Santana K, *Jurnalisme Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) hal.188.

³ Kurniawan Junaedi, *Ensiklopedi Pers Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1991) hal. 228

⁴ Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) hal. 11

⁵ Brings Asa dan Peter Burke, *Sejarah Sosial Media*. Terjemah oleh: A. Rahman Zainuddin. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) hal. 72

tersebut.⁶ Biasanya, berita utama ditampilkan di halaman muka dengan ukuran fontase paling besar.

Dari penegasan-penegasan istilah tersebut, dapat disimpulkan mengenai maksud judul skripsi di atas sebagai serangkaian pedoman atau asas yang menjadi garis besar dan dasar di bidang redaksional sesuai visi, misi dan idealisme pada surat kabar harian (SKH) Kedaulatan Rakyat kaitannya dalam menentukan berita utama (*headline news*) edisi 1 Juni – 31 Agustus 2009.

B. Latar Belakang

Salah satu elemen penting dalam kerja suatu media massa surat kabar adalah divisi redaksi. Bisa dibilang, divisi inilah inti dari kerja persuratkabaran. Redaksi menjadi titik sentral yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan bahan berita yang akan naik cetak, baik yang menyangkut proses peliputan (*reporting*), penulisan berita hingga penyuntingan (*editing*). Salah satu kerja redaksi surat kabar adalah menentukan berita utama (*headline news*) yang ditampilkan di halaman pertama.

Berita utama menjadi tema besar (*grand thema*) yang merupakan laporan utama sebuah surat kabar pada hari itu. Surat kabar manapun, dalam menurunkan sebuah berita pastinya mengacu pada kaidah umum jurnalistik. Tak terkecuali kaitannya dalam menentukan berita utama. Acuan tersebut

⁶ Asep Syamsul Romli, *Jurnalistik Praktis untuk Pemula*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003) hal. 24

biasanya berdasarkan nilai (*value*) suatu berita. Semakin bernilai suatu peristiwa, maka semakin layak untuk dijadikan berita utama.

Nilai berita paling tidak punya empat acuan.⁷ Pertama, aktualitas (*timeliness*) yang berarti baru, hangat dan kekinian. Pada surat kabar harian, segi aktualitas biasanya hanya berselang satu hari pascakejadian. Lebih dari satu hari biasanya sudah tergolong berita basi/tidak aktual.

Kedua, kedekatan (*proximity*) yang mengandung unsur kedekatan dengan pembaca. Kedekatan tersebut, menurut Stieler dan Lippmann bisa berupa fisik maupun emosional. Dari segi fisik terlihat dari lokalitas suatu kejadian. Semakin lokal, maka ia akan punya nilai berita yang tinggi bagi pembaca di lingkup sekitarnya. Sementara dari segi kedekatan emosial bisa dicontohkan dalam kasus insiden pemboman warga Palestina yang mengundang simpati warga muslim di Indonesia. Meski secara fisik berjauhan, tetapi warga di Palestina dan Indonesia punya unsur kedekatan dalam hal agama.

Ketiga, dampak (*consequence*) yang bisa diartikan sebagai akibat dari suatu kejadian. Semakin besar dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat luas, maka peristiwa itu semakin punya nilai berita yang tinggi. Untuk mengukur dampak suatu berita, bisa diajukan dengan pertanyaan “berapa manusia yang terkena dampaknya, seberapa luas dan untuk berapa lama?”

⁷ <http://mywritingsblogs.com>, Diakses tanggal 15 Februari Jam 15.00

Keempat, menarik (*human interest*) yang bisa dipahami sebagai menarik empati, simpati atau menggugah perasaan khalayak pembaca. Meski semua berita pada dasarnya termasuk dalam unsur *human interest*, tetapi dalam ilmu jurnalistik ada pertimbangan tersendiri. *Human interest* tersebut diantaranya yang memuat unsur-unsur seperti ketegangan, ketidaklaziman, minat pribadi, konflik, simpati, kemajuan, seks, usia dan sebagainya.

Akan tetapi tidak semua nilai berita tersebut layak dijadikan berita utama. Berita utama harus punya nilai berita paling tinggi di antara berita-berita tersebut. Jika dikaji lebih mendalam, penentuan berita utama dalam surat kabar ternyata meliputi serangkaian pertimbangan. Dan ini termasuk wilayah kebijakan redaksional yang berlaku di hampir semua media massa. Kendati pada dasarnya semua berita yang akan naik cetak telah memenuhi empat unsur nilai berita di atas, tetapi tak semua berita tersebut layak dijadikan berita utama.

Berita utama di SKH KR umumnya masih bersifat “mengejutkan publik”. Dalam arti selalu ingin berupaya menurunkan berita sensasional sebagaimana isu-isu skandal pejabat, dinamika politik terkini, korupsi intitusi negara dan sebagainya. Sedangkan berita-berita yang menyangkut nilai-nilai Islam misalnya, dimunculkan sesekali hanya karena adanya momentum (misalnya memperingati hari Isra’ Mikraj Nabi Muhammad, peringatan Idul Fitri dan Idul Adha dan lain-lain) atau adanya peristiwa pemicu, misalnya peristiwa demonstrasi umat Islam terkait terorisme yang dinilai tidak sepaham dengan Islam.

Dengan demikian, pemberitaan isu tentang Islam umumnya dijadikan sekedar ritual jurnalisme semata, bukan karena ada agenda *setting* tertentu dari pengelola dapur redaksi (*newsroom*), misalnya dengan menjadikan Islam sebagai sarana mengajak kepada masyarakat untuk kembali kepada kemurnian hidup sebagaimana yang diajarkan Islam.

Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana proses pengambilan keputusan pihak redaksi SKH KR terkait penentuan berita utama.. Walau bagaimanapun, pihak redaksi SKH KR tidak akan asal-asalan saat memilih sebuah isu menjadi berita utama. Perlu serangkaian kajian, penelitian, pertimbangan dan sederet alasan lainnya.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan redaksional SKH Kedaulatan Rakyat dalam menentukan berita utama (*headline news*) edisi 1 Juni – 31 Agustus 2009?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kebijakan redaksional SKH Kedaulatan Rakyat dalam menentukan berita utama (*headline news*) edisi 1 Juni – 31 Agustus 2009.

E. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana mengenai dunia jurnalistik, utamanya mengenai media surat kabar. Lebih jauh, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi mengenai seluk-beluk kerja persuratkabaran terutama divisi redaksi.
- b. Sedangkan dalam tataran praktis, hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai pembanding di antara sekian kerja divisi redaksi koran lokal yang ada di Yogyakarta dan secara umum di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini bisa juga digunakan sebagai bahan evaluasi bagi media bersangkutan (SKH KR).

F. Telaah Pustaka

Penelitian ilmiah mengenai kebijakan redaksional, terutama di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejauh pengamatan penulis, belum pernah dibukukan. Penulis kemudian mencoba menelusuri penelitian tentang SKH Kedaulatan Rakyat, dan ternyata sudah telah banyak dibukukan, mulai dari sisi manajemen redaksional, penelitian perkolom hingga strategi pemberitaan. Di antara sekian pustaka yang berhasil penulis temukan, termasuk tentang kebijakan redaksional adalah sebagai berikut:

1. *Menelaah Kebijakan Redaksi Pers Medan dalam Memberitakan*

Isu HIV/AIDS, disusun oleh J. Anto, KPA Sumatera Utara, 2006.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa kebijakan redaksi pers Medan kaitannya dengan pemberitaan tentang HIV/AIDS masih mengacu pada momentum belaka. Umumnya, pers Medan

memandang isu ini bukan isu yang menjual, karenanya selalu diberitakan secara bias dan tidak lengkap.⁸ Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan redaksional pers Medan dalam memberitakan isu HIV/AIDS.

2. *Pedoman Umum Kebijakan Redaksional University Press*, disusun oleh Ana Nadya Abrar, diterbitkan oleh Pusat Grafika Indonesia Depdiknas, 2006. Penelitian ini secara lengkap menyajikan bagimana cara kerja *university press* guna menerbitkan buku yang layak dibaca oleh khalayak sebanyak mungkin. Di sana dijelaskan kebijakan redaksional yang meliputi standar kelayakan terbit, mekanisme kerja redaksi, penyuntingan dan persiapan pracetak, corak tulisan, keterampilan bertutur dan perangkat kebahasaan yang berlaku di *university press*.⁹

3. *Tipologi Pemberitaan Kedaulatan Rakyat tentang Pemilu 2004 (11 Maret-26 Juli)* yang disusun oleh Aas Praisal, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberitaan SKH KR punya beberapa tipe, yakni tipe perjuangan, tipe demokrasi, tipe pencitraan dan konstruksi paspol dan tipe gender.¹⁰

⁸ J. Anto, *Menelaah Kebijakan Redaksi Pers Medan dalam Memberitakan Isu HIV/AIDS*, KPA Sumatera Utara, 2006.

⁹ Ana Nadya Abrar, *Pedoman Umum Kebijakan Redaksional University Press*, Pusat Grafika Indonesia Depdiknas, 2006.

¹⁰ Aas Praisal, *Tipologi Pemberitaan Kedaulatan Rakyat tentang Pemilu 2004 (11 Maret-26 Juli)*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

4. *Kategorisasi Tajuk Rencana Harian Umum Kedaulatan Rakyat Ditinjau dari Aspek Dakwah*, ditulis oleh Zainal Arifin, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. Zainal mendapat kesimpulan bahwa tajuk rencana Harian Umum KR ternyata juga bermuatan dakwah. Baik yang meliputi aspek politik dan pemerintahan, bidang hukum dan pemerintahan, pendidikan dan ilmu pengetahuan, ekonomi serta sosial, budaya dan kemasyarakatan.¹¹

5. *Strategi Menulis Artikel di Koran Kedaulatan Rakyat*, disusun oleh Ahmad Zubair Hsb, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Penelitian ini berhasil menguak strategi-strategi yang bisa diterapkan saat menulis artikel agar segera dimuat. Ahmad Zubair juga menemukan hambatan-hambatan yang sering dihadapi penulis yakni persaingan yang amat ketat, sulit menuangkan ide dan sulit memilih tema yang aktual.¹²

Sejauh pengamatan penulis, penelitian yang berkaitan dengan kebijakan redaksional SKH KR dalam menentukan berita utama (*headline news*) belum pernah dibukukan. Dengan demikian, dapat penulis tegaskan bahwa penelitian ini merupakan yang pertama kali dan berbeda dari berbagai penelitian sebelumnya.

¹¹ Zainal Arifin, *Kategorisasi Tajuk Rencana Harian Umum Kedaulatan Rakyat Ditinjau dari Aspek Dakwah*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹² Ahmad Zubair Hsb, *Strategi Menulis Artikel di Koran Kedaulatan Rakyat*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Beberapa hal yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah pada subyek, obyek dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini mempunyai subyek pemimpin redaksi SKH KR dan redaktur halaman utama, sedangkan obyek yang diteliti adalah berita-berita utama SKH KR selama bulan Juni sampai Agustus 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pemimpin redaksi atau wakil pemimpin redaksi, redaktur halaman utama, redaktur pelaksana SKH KR dan dokumentasi.

G. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Tentang Kebijakan Redaksional

Joseph R Dominick, sebagaimana dikutip Jalaluddin Rahmat dalam bukunya yang berjudul Psikologi Komunikasi, membagi dua jenis kebijakan yang terdapat dalam lembaga penerbitan pers. Adapun kedua jenis kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- a. *Operating Policy* (kebijakan operasional). Kebijakan ini menyangkut peliputan berita sehari-hari ataupun mengenai situasi yang timbul setiap hari.
- b. *Editorial Policy* (kebijakan editorial). Kebijakan ini diikuti sikap komunikator untuk mempengaruhi khalayak mengenai suatu isu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

¹³ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996)

Dalam bahasa lain, kebijakan operasional adalah menyangkut pedoman umum tentang kerja pers. Sementara kebijakan editorial adalah menyangkut isi berita yang dibuat oleh redaksi sesuai visi dan misi yang diusung media bersangkutan. Hampir semua media massa punya kebijakan operasional yang sama sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang pers dan kode etik jurnalistik yang berlaku.¹⁴ Sedangkan kebijakan editorial, masing-masing media massa punya perbedaan-perbedaan tersendiri.

Kebijakan operasional tersebut meliputi keputusan-keputusan terhadap kode etik jurnalistik, menjunjung tinggi ideologi Pancasila dan menghindari hal-hal yang melanggar SARA (Suku, Agama dan Ras). Di Indonesia, pedoman umum mengenai kerja pers tertuang dalam undang-undang pers yakni Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999.¹⁵

Dalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan mengenai aturan main sebuah usaha penerbitan pers. Aturan main tersebut antara lain meliputi ketentuan umum (asas, fungsi, hak kewajiban dan peranan pers, wartawan, perusahaan pers, dewan pers, pers asing, peran serta masyarakat, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup). Disamping itu, setiap usaha pers juga wajib menjalankan kode etik jurnalistik wartawan Indonesia seperti (kepribadian dan integritas,

¹⁴ David S. Broder, *Berita Di Balik Berita*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

¹⁵ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006) hal. 328.

cara pemberitaan, sumber berita, kekuatan kode etik jurnalistik serta kode etik aliansi jurnalis independen).¹⁶ Kode etik jurnalistik dibentuk oleh wartawan sendiri melalui kongres.¹⁷

Aturan ini, menurut Mahbub Junaidi, sebagaimana dikutip Ermanto, adalah ibarat polisi buatan sendiri.¹⁸ Aturan ini bukan dibuat oleh instansi pemerintah melainkan datang dari kesadaran para insan pers/wartawan. Kode etik jurnalistik sebagai bukti bahwa lembaga pers juga punya otonomi sendiri sebagai pedoman agar pekerja pers tidak bertindak sesuka hatinya.

Adanya kode etik jurnalistik ini, maka bisa dibilang pers Indonesia menganut pers bebas dan bertanggungjawab. Artinya, tanpa adanya kebebasan (masih adanya intervensi dari pihak lain), maka wartawan akan sulit bekerja secara maksimal. Sedangkan bertanggungjawab dimaksudkan agar wartawan tidak terjerumus ke dalam praktik kotor yang dapat merendahkan martabat manusia. Untuk itulah keberadaan kode etik jurnalistik menjadi sangat penting.¹⁹

Kode etik jurnalistik pertama kali dirumuskan pada konferensi PWI di Malang pada tahun 1947. Namun, pedoman tersebut masih kurang sempurna sehingga diperbarui lagi di Jakarta pada tahun 1950. Pembaruan

¹⁶ Wikipedia. *Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999*.

¹⁷ Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional*, (Yogyakarta: Cinta Pena, 2005) hal. 166.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Yunaldi, *Kiat Praktis Jurnalistik*, (Padang: Angkasa Raya, 1992).

demi pembaruan terus dilakukan hingga akhirnya dirumuskan kode etik jurnalistik yang disahkan pada sidang gabungan Pengurus Pusat dan Badan Pengawasan dan Perkembangan PWI di Batam pada 2 Desember 1994. Di era reformasi, wacana kebebasan pers terus bergulir. PWI bukan satu-satunya organisasi wartawan yang ada di Indonesia, sehingga pada tanggal 6 Agustus 1999 dicetuskan 7 butir Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang dibidani 27 organisasi wartawan Indonesia yang bertempat di Bandung. Bunyi 7 butir kesepakatan tersebut adalah:

- a) Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- b) Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarlu informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
- c) Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.
- d) Wartawan Indonesia tidak menyiarlu informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahanan susila.
- e) Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.

- f) Wartawan Indoensia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.
- g) Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Undang-undang pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) ini ibarat buku suci yang perlu dipahami dan dijalankan oleh segenap insan pers. Di sana sudah diterangkan secara detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pers hingga tuntutan pidana bagi yang melanggar. Dengan demikian ungkapan pers bebas di era reformasi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Akan tetapi tetap ada norma yang berlaku dan wajib diikuti bagi setiap usaha penerbitan pers dan bertanggungjawab.

Produk jurnalisme (berita) tidak dapat dipisahkan dari kebijakan redaksional yang ada dalam dapur redaksi (*newsroom*). Kebijakan redaksional (*editorial policy*) adalah pedoman (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang menjadi buku rujukan divisi redaksi dalam mengelola *newsroom*.²⁰ Kebijakan redaksional acap diartikan juga sebagai ketentuan yang disepakati oleh redaksi media massa tentang kriteria berita atau tulisan yang boleh atau tidak boleh dipublikasikan sesuai visi dan misi media yang bersangkutan.

²⁰ J. Anto, *Menelaah Kebijakan Redaksi Pers Medan dalam Memberitakan Isu HIV/AIDS*, KPA Sumatera Utara, 2006.

Pada dasarnya, *editorial policy* memusatkan perhatian pada bagaimana aspek-aspek dan misi ideal yang dijabarkan dalam peliputan dan penempatan berita, laporan, tulisan dan gambar yang sesuai dengan khalayak yang relatif beragam. Karena sifat khalayak anonim dan heterogen, maka bahasa jurnalistik yang dipilih tentu harus memenuhi asas anonim dan heterogenitas itu. Agar memudahkan seluruh pengelola dalam pemakaian bahasa jurnalistik maka dibuatlah semacam pedoman/petunjuk sebagai rujukan intern resmi dalam peliputan, penulisan, pemuatan media bersangkutan.

2. Tinjauan Tentang Kerja Keredaksian

Kekuatan dan daya tarik suatu media massa di mata pembaca terletak dari sejauhmana kualitas berita dan informasi yang disajikan.²¹ Sebelum disajikan kepada pembaca, sebuah berita atau informasi lebih dulu melalui serangkaian proses. Proses ini termasuk dalam divisi redaksional serta unsur-unsur yang terkait didalamnya. Adapun proses-proses tersebut antara lain meliputi:

a) Peliputan

Peliputan dalam kerja redaksional adalah mencari berita (news hunting) atau meliput bahan berita. Sebelum berita diliput, harus melalui perencanaan yang dituangkan dalam

²¹ Conrad C. Fink, *Strategic Newspaper Management*, (New York: Random House, 1998) hal. 138

rapat proyeksi redaksi. Dalam rapat itulah seorang wartawan diamanati tugas untuk meliput pelbagai berita yang sedang aktual. Model meliput berita sendiri terdapat tiga teknik yaitu reportase, wawancara dan riset kepustakaan.

Saat menunaikan tugas, wartawan juga ditemani fotografer jurnalistik yang bertugas mengabadikan setiap momen yang mendukung terhadap berita yang sedang diliput. Atau kalau tidak, wartawan itu sendiri yang merangkap sebagai fotografer.

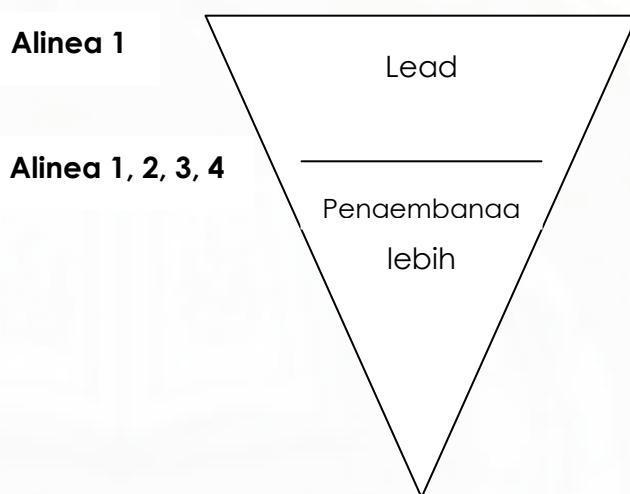
b) Penulisan

Setelah meliput, wartawan harus menuliskan kembali berita mentah yang sudah didapat menjadi berita setengah jadi dalam bentuk teks. Biasanya, dalam penulisan berita digunakan teknik piramida terbalik (*inverted pyramid*) serta mengacu pada rumusan 5W + 1H. Saat menulis berita, wartawan atau reporter tidak diperkenankan memasukkan pendapat pribadi pada berita yang ditulis. Sebab, berita merupakan laporan tentang fakta obyektif yang sedang terjadi di lapangan.

Pola piramida terbalik berarti menyusun pesan secara deduktif. Dalam arti, kesimpulan dinyatakan terlebih dahulu pada paragraf pertama yang disusul penjelasan dan uraian yang lebih rinci para paragraf-paragraf selanjutnya. Rumusannya,

semakin ke bawah, nilai berita semakin tidak penting. Di bawah ini gambaran penulisan berita langsung (*straight news*) dengan menggunakan pola piramida terbalik.

Bagan 1. Straigth News²²



c) Penyuntingan

Penyuntingan naskah atau editing adalah proses memperbaiki atau menyempurnakan tulisan baik yang menyangkut redaksional maupun substansional. Orang yang bertugas menyunting berita disebut editor. Dari sisi redaksional, editor membenahi hal-hal sekitar penggunaan kata atau kalimat sehingga berita yang akan dicetak lebih logis, mudah dipahami serta tidak rancu. Selain itu, perbaikan juga

²² Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Op.Cit* hal. 126

meliputi ejaan dan cara penulisan sehingga tidak menyalahi kaidah bahasa yang berlaku.

Sementara dari sisi substansional, editor menekankan pada fakta dan data agar senantiasa terjaga keakuratan dan kebenarannya. Yang tak kalah penting juga ialah menyangkut logika berita, apakah suatu isi berita mudah dipahami pembaca atau justru membingungkan.

Dengan demikian, proses menyunting tidak sebatas memotong (*cutting*) naskah agar pas sesuai kolom yang tersedia, tetapi juga membuat tulisan lebih nyaman dibaca, menarik serta tidak mengandung kesalahan secara faktual.

3. Tinjauan Tentang Surat Kabar Harian

Menurut Totok Djuroto, surat kabar adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran plano, terbit teratur, bisa setiap hari atau setiap minggu.²³ Surat kabar harian adalah sekumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang terbit setiap hari²⁴ Dengan demikian, surat kabar harian adalah surat kabar yang terbit secara harian (*daily*).

4. Tinjauan Tentang Berita Utama

²³ Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) hal. 11

²⁴ Graeme Burton, *Yang Tersembunyi Di Balik Media, Pengantar Kepada Kajian Media*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2008) hal. 3

Surat kabar yang terbit secara harian selalu punya berita utama (*headline news*). Berita utama merupakan berita yang dijadikan unggulan pada setiap edisinya. Berita utama merupakan berita terpenting dalam terbitan pada hari tersebut.²⁵ Berita utama adalah berita yang keberadaannya memungkinkan berita-berita lain yang diliput pada hari tersebut.²⁶ Biasanya, berita utama ditampilkan di halaman muka dengan ukuran fontase paling besar dan paling mencolok.

5. Tinjauan Tentang Nilai Berita

Secara umum, berita layak muat paling tidak harus akurat, lengkap, adil dan berimbang, obyektif, ringkas dan hangat.²⁷

a. Akurat

Sebuah berita layak muat haruslah memenuhi unsur akurat. Semakin tinggi tingkat akurasi sebuah berita, semakin tinggi pula apresiasi yang diberikan para pembaca. Wartawan yang paham akan hal ini akan selalu hati-hati dan cermat kaitannya dengan penulisan nama, angka, tanggal, ejaan dan meninjau ulang fakta berita dan keterangan yang telah ditemui. Selain itu, berita yang akurat adalah berita yang diperoleh setelah ada konfirmasi langsung dari narasumber maupun melihat fakta sesungguhnya di

²⁵ Brings Asa dan Peter Burke, *Op.Cit* hal. 72

²⁶ Asep Syamsul Romli, *Op.Cit* hal. 24

²⁷ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Op.Cit* hlm. 47-58.

lapangan. Ia tidak hanya sekedar asumsi-asumsi saja yang pada akhirnya justru akan menjerumuskan masyarakat pembaca.

b. Lengkap, Adil dan Berimbang

Berita yang akurat tak menjamin keakuratan arti. Karena itulah sebuah berita akurat harus disusun secara lengkap, adil dan berimbang. Artinya, fakta yang ada haruslah ditulis dengan apa adanya, tanpa ditambah-tambahi, dikurangi, penekanan pada segi tertentu dan sebagainya. Berita yang tidak disusun secara lengkap, adil dan berimbang akan menimbulkan arti yang berbeda-beda bahkan bisa jauh melenceng dari fakta yang ada. Idealnya memang demikian, akan tetapi fakta di lapangan, sebuah media massa terkadang sengaja menutupi bagian-bagian tertentu yang disesuaikan dengan visi dan misi media tersebut.

c. Ringkas dan Jelas

Salah satu unsur berita yang layak muat adalah ditulis dengan ringkas dan jelas. Artinya, ditulis dengan bahasa sederhana, tidak bertele-tele (langsung), mudah dipahami dan tidak ambigu. Hal ini bertujuan agar suatu berita tidak membosankan dan membingungkan masyarakat pembaca.

d. Hangat

Hangat disini bisa berarti sesuatu yang baru. Hal tersebut sesuai dengan asal muasal kata “news” yang jika dalam bahasa Indonesia berarti berita. Kata “news” sendiri berasal dari “new” yang menunjukkan unsur waktu (apa yang baru, lawan dari kata lama). Dalam surat kabar harian, berita dinyatakan hangat jika kejadiannya tak lebih dari 24 jam usai kejadian. Apa yang terjadi hari ini misalnya, paling tidak esok hari harus sudah diberitakan. Lebih dari itu maka berita sudah tergolong basi.

Hal ini bisa dimaklumi karena pembaca tentu saja menginginkan berita-berita yang cepat saji, segar dan hangat. Hangat disini dalam bahasa lain disebut aktual. Jika suatu media massa koran tak mampu menyajikan berita secara aktual, bukan tidak mungkin lama kelamaan akan segera ditinggalkan pembacanya dan kemudian berlaih ke media lain yang lebih aktual.

Nilai berita (*news value*) menurut pendapat lain adalah *actual* (kekinian), signifikansi (penting), *magnitude* (besar), *proximity* (kedekatan), *prominence* (tenar), *human interest* (manusiawi), konflik dan *the unusual* (tidak biasa).²⁸

a. Actual (kekinian)

²⁸ Yunaldi, *Kiat Praktis Jurnalistik* (Padang: Angkasa Raya, 1992).

Pengertian aktual adalah paling baru yang mengandung unsur kekinian. Contoh: Acara rapat pansus skandal Bank Century yang menghadirkan Komjen Susno Duadji pada 20 Januari 2010 akan menjadi tidak aktual jika diberitakan dua hari atau tiga hari kemudian. Berita tersebut harus sudah disebarluaskan maksimal keesokan harinya. Apalagi jika media massa tersebut berupa harian maka aktualitas hanya dihitung sehari semalam.

b. Signifikansi (penting)

Peristiwa penting yang berpeluang mempengaruhi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan khalayak pembaca. Contoh: bencana alam berupa gempa bumi adalah peristiwa sangat penting karena dampaknya sangat besar, baik korban nyawa maupun materi.

3. Magnitude (besar)

Peristiwa yang besar yang menyangkut angka-angka (kuantitas) yang bila dijumlahkan akan menarik bagi pembaca. Contoh: jumlah pengangguran terdidik di Indonesia yang jumlahnya mencapai jutaan dan setiap tahun cenderung bertambah. Semakin tinggi angka tersebut semakin layak untuk dijadikan berita.

4. Proximity (kedekatan)

Peristiwa yang terjadi dekat dengan kehidupan pembaca, baik secara geografis atau emosional. Contoh: pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta yang tak kunjung selesai menjadi tema yang lebih menarik bagi masyarakat Yogyakarta dari pada pembahasan Undang-Undang tentang kelautan misalnya.

e. Prominence (tenar)

Peristiwa ini mendasarkan pada ketenaran baik berupa benda maupun seseorang yang sudah menjadi figur publik dan dekat dengan pembaca. Contoh: seorang pemain sinetron/celebritis yang sedang bercerai dengan pasangannya. Meski perceraian adalah peristiwa yang biasa-biasa saja, tetapi akan menjadi penting jika sudah menyangkut seorang tokoh yang sudah tenar di tengah-tengah masyarakat.

f. Human Interest (manusiawi)

Peristiwa yang mampu membangkitkan perasaan atau hati khalayak pembaca. Biasanya berupa peristiwa yang terjadi pada orang biasa namun dalam situasi yang luar biasa. Contoh: sidang kasus pencurian 3 bibit kakao oleh Mbah Minah, nenek renta asal Purbalingga yang menyentak rasa keadilan masyarakat Indonesia.

g. Konflik

Biasanya peristiwa yang menghadirkan perseteruan baik secara politis maupun fisik antar dua belah pihak. Contoh: peristiwa perang di Aceh, pertandingan Persebaya melawan Persib dan sebagainya.

h. The Unusual (tidak biasa)

Peristiwa yang jarang dan tidak biasa terjadi. Misalnya: salah satu korban gempa bumi di Yogyakarta ditemukan masih hidup meski sudah terkubur dalam reruntuhan bangunan selama satu minggu.

Berita-berita yang layak muat tidak semuanya layak dijadikan berita utama. Berita utama haruslah memiliki nilai berita yang paling tinggi di antara sekian berita yang masuk ke meja redaksi. Di sinilah perlunya kecermatan segenap jajaran redaksi terutama pemimpin redaksi untuk bisa tepat dalam memilih berita utama yang akan diturunkan keesokan harinya.

Di samping itu, ketepatan memilih berita utama dapat memuaskan rasa penasaran pembaca terkait suatu peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa media massa punya kuasa untuk memilih berita mana yang akan ditonjolkan atau dihilangkan, tetapi pada dasarnya tetap harus memperhatikan kecenderungan khalayak pembaca. Hanya dengan demikian sebuah media massa akan terus dipercaya oleh pembaca yang notabene aset yang tak ternilai harga bagi surat kabar bersangkutan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, di mana sering digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu maupun kelompok yang perilakunya telah diamati.

Sementara dari sisi sifatnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.²⁹

2. Sumber Data dan Fokus Penelitian

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh langsung dari narasumber. Dalam hal ini narasumber yang dimaksud adalah pemimpin redaksi atau wakil pemimpin redaksi, redaktur halaman utama dan redaktur pelaksana. Sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan atau dokumen harian SKH KR. Selain itu, penulis juga berupaya mencari referensi tambahan yang relevan jika dibutuhkan.

Fokus dari penelitian ini adalah pada kebijakan redaksional SKH KR kaitannya dengan mekanisme penentuan berita utama (*headline news*) pada setiap edisinya.

²⁹ Lexy J Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998) hal.3

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Interview atau wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan proses tanya-jawab yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁰ Jenis wawancara yang digunakan berpedoman terpimpin, yaitu pewawancara menentukan sendiri urutan dan juga pembahasannya selama wawancara.³¹ Dalam penerapannya, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber sesuai dengan tema yang dibahas. Subyek yang diwawancarai adalah pemimpin redaksi atau wakil pemimpin redaksi, redaktur halaman utama dan redaktur pelaksana SKH KR.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, pada saat wawancara berlangsung terjadi pengembangan-pengembangan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Hal tersebut diperbolehkan selama tidak menyimpang dari fokus penelitian dan tetap relevan dengan materi pembahasan yakni data-data tentang kebijakan redaksional SKH Kedaulatan Rakyat terkait penentuan berita utama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, notulen rapat, agenda dan

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994) hal. 192

³¹ Britha Mickhelsen, *Metode Penelitian Parsipatori dan Upaya-Upaya Pemberdayaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999) hal. 128

sebagainya.³² Adapun dokumentasi yang diperlukan adalah yang menunjang sesuai tema penelitian. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memperkuat dan memperoleh data mengenai kebijakan redaksional SKH KR terkait pada penentuan berita utama.

4. Analisis Data

Tahap analisis data merupakan upaya mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang realitas yang ada guna menarik kesimpulan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³³ Penelitian yang mengambil pesan sebagai pusat perhatian biasanya menggunakan analisis isi (*content analysis*).³⁴

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan pola pikir deduktif-induktif yaitu menarik kesimpulan dari yang sifatnya umum guna mencari kesimpulan yang bersifat khusus, begitu juga sebaliknya, yaitu berangkat dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus. Langkah-langkahnya adalah membaca, meneliti dan menganalisa berita-berita utama pada SKH KR (edisi 1 Juni – 31 Agustus 2009) dan mengklasifikasi sesuai kategori yang sudah ditentukan. Hasil analisis ini kemudian

³² Talizidulu Nadraha, *Research Teori Metodologi Administrasi*, (Bandung: Bina Aksara, 1985) hal. 236

³³ Lexy J. Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) hal. 190

³⁴ Bambang Setiawan, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995) hal. 50

dikomparasikan dengan hasil wawancara maupun dokumentasi guna mendapatkan kesimpulan.

Alasan kenapa penulis meneliti 3 bulan pemberitaan karena dalam tiga bulan tersebut terdapat peristiwa-peristiwa yang sangat beragam dan besar. Sebut saja peristiwa Pemilu Presiden (Pilpres), upaya pemberantasan teroris, tindak lanjut Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY dan sebagainya. Dengan demikian, tiga bulan ini cukuplah untuk mengetahui sejauhmana kecenderungan SKH KR dalam menurunkan setiap berita utama. Apakah ia berpegang teguh pada prinsip lokalitas, ataukah selalu mengutamakan isu nasional dan semacamnya.

Idealnya, untuk mengetahui kebijakan redaksional paling tidak butuh satu tahun pemberitaan. Dalam satu tahun itu bisa diketahui seberapa besar kecenderungan pihak redaksi dalam memberitakan suatu peristiwa. Akan tetapi, karena faktor keterbatasan, mulai dari biaya, waktu dan sebagainya yang belum memungkinkan penulis meneliti edisi satu tahun penuh, maka penulis mengambil sampel tiga bulan terakhir sebelum penulis membuat proposal penelitian ini. Meski begitu, tiga bulan ini barangkali cukup untuk mewakili dan mengetahui bagaimana kebijakan redaksional SKH KR dalam menentukan berita utama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya (Bab III), dapat ditarik kesimpulan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kebijakan redaksional SKH KR dalam menentukan berita utama (*headline news*) edisi 1 Juni – 31 Agustus 2009. Dari penelitian yang sudah diupayakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut terbagi dalam dua hal, yakni operasional dan editorial.

Kebijakan operasional meliputi kepatuhan pada UU Pers No.40 tahun 1999 dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Sedangkan dalam kebijakan editorial mengacu pada konsep nilai berita. Nilai berita yang berlaku di SKH KR adalah aktual, *signifikansi* (penting), *magnitude* (besar), *proximity* (kedekatan), *prominence* (tenar), *human interest* (manusiawi), konflik dan *the unusual* (tidak biasa).

Selain itu, dalam berita utama yang diturunkan, SKH KR punya tujuan untuk; *pertama*, SKH KR berupaya untuk mengawal dinamika perkembangan Indonesia di berbagai bidang. *Kedua*, SKH KR berupaya untuk menjalankan misi membela kepentingan rakyat yang tertindas. *Ketiga*, bertujuan untuk

menjadi media massa yang berisi hiburan sekaligus pendidikan. *Keempat*, berupaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat DIY dan sekitarnya dengan menjadikan isu lokal DIY sebagai berita utama.

Dalam kebijakan editorial juga menyangkut teknis penulisan berita yakni; bahasa yang digunakan, penggunaan cantelan berita, ukuran fontase, tata letak, foto pendukung dan penulisan kode wartawan. Keputusan tertinggi dalam menentukan berita utama SKH KR adalah pada rapat redaksi. Rapat inilah yang kemudian membahas mana berita yang paling layak untuk dijadikan berita utama keesokan harinya.

B. Saran

Saran yang bisa penulis sampaikan terkait kebijakan SKH KR dalam menentukan berita utama adalah; hendaklah lebih dipertimbangkan secara masak-masak saat menentukan peristiwa besar menjadi berita utama yang bisa jadi hanya isu yang sengaja dibuat pihak tertentu untuk memperkeruh situasi kenegaraan, hendaklah selalu kritis mempertanyakan dampak bagi masyarakat jika suatu peristiwa/kasus dijadikan berita utama dan hendaklah tidak mengekor pada model pemberitaan yang mengutamakan sensasi.

C. Penutup

Alhamdulillah, secara umum penelitian ini telah selesai. Hal ini tentu tak luput dari petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Ibarat tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari karya kecil ini sangat jauh dari

kesempurnaan. Karena itu, saran konstruktif dari pembaca sekalian akan selalu penulis harapkan agar pada penelitian selanjutnya bisa “lebih baik”.

Tidak elok jika tak menyebut nama Pak Hamdan Daulay dan Bunda Evi Septiani yang banyak direpotkan oleh penulis (*jazakumullah akhsanal jaza*). Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada, rekan, sahabat, handai taulan baik yang jauh maupun dekat. Semoga Allah senantiasa memberkati kehidupan kita. Amiiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aas Praisal, ***Tipologi Pemberitaan Kedaulatan Rakyat tentang Pemili 2004 (11 Maret-26 Juli)***, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Ahmad Zubair Hsb, ***Strategi Menulis Artikel di Koran Kedaulatan Rakyat***, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Asep Syamsul Romli, ***Jurnalistik Praktis untuk Pemula***, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Bambang Setiawan, ***Metodologi Penelitian Komunikasi***, Jakarta: Universitas Terbuka, 1995.
- Brings Asa dan Peter Burke, ***Sejarah Sosial Media***. Terjemah oleh: A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Brittha Mickhelsen, ***Metode Penelitian Parsipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan***, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Conrad C. Fink, ***Strategic Newspaper Management***, New York: Random House, 1998.
- David S. Broder, ***Berita Di Balik Berita***, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Dedy Mulyana, ***Ilmu Komunikasi***, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Depdikbud, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III***, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Ermanto, ***Menjadi Wartawan Handal dan Profesional***, Yogyakarta: Cinta Pena, 2005.
- Faisal Ismail, ***Pencerahan Spiritualitas Islam di Tengah Kemelut Zaman Edan***, Yogyakarta: Titian Wacana, 2008.
- Hamdan Daulay, ***Pasang Surut Dakwah dalam Dinamika Budaya, Politik dan Keluarga***, Yogyakarta: Yayasan Fokus Indonesia, 2009.
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, ***Jurnalistik, Teori dan Praktek***, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Juliani Baggini, ***Making Sense, Filsafat di Balik Headline Berita***, Jakarta: Teraju, 2003.
- Kurniawan Junaedi, ***Ensiklopedi Pers Indonesia***, Jakarta: Gramedia, 1991.

Lexy J. Meloeng, ***Metode Penelitian Kualitatif***, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.

M. Dahlan Al Basry, ***Kamus Ilmiah Populer***, Surabaya: Arloka, 1994.

Onong Uchyana Effendi, ***Kamus Istilah Komunikasi***, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Septiawan Santana K, ***Jurnalisme Kontemporer***, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Sudarwan Danim, ***Pengantar Studi Penelitian Kebijakan***, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Sutirman Eka Ardana, ***Jurnalistik Dakwah***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sutrisno Hadi, ***Metodologi Research***, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Talizidulu Nadraha, ***Research Teori Metodologi Administrasi***, Bandung: Bina Aksara, 1985.

Totok Djuroto, ***Manajemen Penerbitan Pers***, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Zainal Arifin, ***Kategorisasi Tajuk Rencana Harian Umum Kedaulatan Rakyat Ditinjau dari Aspek Dakwah***, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Sumber Lain:

Kliping SKH Kedaulatan Rakyat tanggal 1 Juni – 31 Agustus 2009.

Surat elektronik (email) dengan Octo Lampito, Pemimpin Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat tertanttal 28 Februari 2010

Wawancara dengan Hudono Redaktur Halaman Utama SKH KR, 18 Januari 2010 jam 14.00.

Wawancara dengan Achmad Luthfi, Wakil Pemimpin Redaksi SKH KR pada 18 Februari 2010, Jam 15.00.

Wawancara dengan Arwan Tuti Artha, Redaktur Pelaksana SKH KR pada 19 Februari 2010, jam 16.00.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Safrdin
TTL : Semarang, 3 Nopember 1985
Alamat Rumah : Wonosari, RT 02 RW V Koripan, Susukan, Semarang,
50777
Alamat Tinggal : Pasar Talok, Gendeng, Baciro, Yogyakarta
HP : 085 959 413 088
E-mail : safrudin_ygy@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK Raudlathul Athfal Koripan (1990-1992)
- MI Koripan II (1992-1998)
- MTsN Susukan (1998-2001)
- SMA Al-Husain Magelang (2001-2004)
- UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (2004-2010)

HOBI

- Menulis
- Jalan-jalan

PUBLIKASI

- Beberapa tulisannya dimuat di pelbagai surat kabar baik lokal maupun nasional. Surat kabar lokal antara lain (*SKH Kedaulatan Rakyat, Bernas, Harian Jogja, Minggu Pagi, Pelita, Suara Karya, Koran Jakarta, Surabaya Post, Suara Merdeka, Wawasan, Kompas Jogja, Joglosemar, Koran Merapi, Meteor, Tabloid Dinamika UNY, Harian Online Kabar Indonesia*) dan surat kabar nasional antara lain (*Suara Pembaruan, Republika dan Sepatu Indonesia*).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PUSAT BAHASA, BUDAYA & AGAMA

Jl. Mergangsan 100, Sleman, Yogyakarta 55281

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/0689.b /2010

Herewith the undersigned certifies that:

Name : Muhammad Safrodin
Date of Birth : November 3, 1985
Sex : Male

Took TOEC (Test of English Competence) held on February 19, 2010 by Center for Language and Culture of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	41
Structure & Written Expression	41
Reading Comprehension	43
Total Score	125



Muhammad Armin, Lc., M.A.

030604 199203 1 003



وزارة الشؤون الدينية
جامعة مونان كاليجارا الإسلامية الحكومية بجوكجاكرنا
مركز اللغة والثقافة

شهادة

الرقم: ٦٠٢٨٩٣/٢/٩٠٦١٧/٥/٢٠١٩

تشهد إدارة مركز اللغات والثقافات بان:

Muhammad Safrodin : الـ

١٩٨٥ : ٣ نوفمبر تاریخ المیاد

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٨ فبراير ٢٠١٠، وحصل

علي درجة :

٨,٤	فهم المسموع
٧,٢	الراكب الخوريه والتعويت الكافي
١٣,٢	فهم المفروض
٢٩	مجموع الدرجات



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : LIDN.02/XPM/PP/06/186/2006

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan penghargaan kepada

Nama :	Muhammad Sabarin
Tanggal dan Tempat Lahir :	Semarang, 3 November 1985
Nomor Induk Mahasiswa :	06210304
Fakultas :	UIN

Yang telah melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Program Volunter Untara (PV) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam rangka memerangi Korban Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah di

Lokasi/Kota	Kasanggulan
Kecamatan	Ngawi
Kabupaten	Bantul
Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta

Di tanggal 10 Juni, th. 2006 (susul bantuan)

Demiksi kali ini mengadakan acara yang kompetitif, profesional, akreditasi, generalis, populis dan memiliki kualitas pengetahuan yakni



Yogyakarta, 17 Juni 2006

Pj. Rektor

103784005

Drs. Zainal Abidin, S.Pd., M.Pd.

No : UIN.02/P.AK/PP.90.9/C.3.2/2009



PUSAT KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Nama : MUHAMMAD SAFRODIN

NIM : 05210049

Fakultas : Dakwah UIN Sunan Kalijaga

telah berhasil menyelesaikan

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

dengan predikat

MEMUASKAN

Diselenggarakan oleh PKSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
pada tanggal:

2 Maret 2010

Pembantu Rektor
Bidang Akademik



Bapak Sekamta, M.A.
NIP. 0910121 198503 1 001

Kepala PKSI



Sumarsam, M.Kom.
NIP. 19710209 200501 1 003





DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/KPM/PP.06/249/2006

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama	: Muhammad Saffordin
Tempat dan tanggal Lahir	: Semarang, 3 Nopember 1985
Nomor Induk Mahasiswa	: 05210049
Fakultas	: Dakwah

Yang telah melaksanakan Kegiatan Relawan UIN Sunan Kalijaga dalam rangka membantu Korban Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, di :

Lokasi/Desa	: Karangtalon
Kecamatan	: Imogiri
Kabupaten	: Bantul
Propinsi	: Daerah Istimewa Yogyakarta

dan tanggal 10 Juni s.d. 9 Juli 2006, dengan nilai 80,00 (B+).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Kegiatan Relawan yang disertarkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Kalijaga (KKN Semester Pendek Tahun Akademik 2006/2006/Angkatan ke-58) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti Ujian Munaqasyah Skripsi.

Yogyakarta, 8 November 2006

Pgs. Ketua

Dra. Zainal Abidin
NIP. 150091626





DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274)
552230 Yogyakarta 55221

Nomor: UIN/2/PD.I/TL_01/1436/2009

Lamp.: Proposal Skripsi.

Hal.: Permohonan izin penelitian.

Yogyakarta, 3 Nopember 2009

Kepada Yth.,

Gubernur Pemerintah Propinsi DIY
C.q. Kabiro Administrasi Pembangunan
Setda Propinsi DIY
Kepatihan - Danurejan
di Yogyakarta 55213.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terkait dengan bahan penulisan skripsi/thesis, dengan hormat bersama ini kami mohon izin mengadakan riset/penelitian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini :

Nama : Muhammad Safordin.
Nomor Induk : 05210049
Semester : IX
Jurusan : KPI
Alamat : Pasar Talok, Gendeng, Baciro, Yogyakarta.
Judul Skripsi : Kebijakan SKH Kedaulatan Rakyat Dalam Menentukan Berita Utama (Headline News)
Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif
Waktunya : 4 Nopember 2009 s.d. 4 Februari 2010

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagai berikut terlampir.

Demikian atas izin dan kerjasama Saudara diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Dakwah (sebagai lapornya).
2. Pimpinan SKH Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Penunggu

Sertifikat

Nomor: 12/Pnktm/KPI/II/2009

PANITIA PELAKSANA PRAKTIKUM MEDIA ANGKATAN KE-22
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)
FAKULTAS DAKWAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2008/2009



Panitia Pelaksana Praktikum Media Mahasiswa Jurusan KPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: Muhammad Safordin
Nomor Induk Mahasiswa	: 05210049
Fakultas	: Dakwah
Jurusan	: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

telah melaksanakan PRAKTIKUM MEDIA Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-22 Semester Gasal Tahun Akademik 2008/2009 di RADAR JOGJA dan dinyatakan LULUS, dengan nilai A.

Demikian Sertifikat ini diberikan dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 8 Februari 2009
PANITIA PELAKSANA
PRAKTIKUM MEDIA
FADUA,
Muhammad X. Ag. M.Hum
NIP. 150291024



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 6699

Membaca Surat : Dekan Fakultas Dakwah UIN "SUKA" Nomor : UIN/2/PD/ITL/01/1496/2009
Tanggal Surat : 3 Nopember 2009 Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dilinjau kepada :
Nama : Muhammad Safrodin
NIM : 5210049
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : Kebijakan SKH Kedaulatan Rakyat Dalam Menentukan Berita Utama (Headline News)
Lokasi : Yogyakarta
Waktu : 29 Desember 2009 s/d 29 Maret 2010

Ketentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
2. Memperoleh soft copy hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD), dan menunangkan cetakan asli.
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
4. Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2009

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UB : Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta cq. Ka Ditres Perizinan
3. Pimpinan SKH Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta
4. Dekan Fakultas Dakwah UIN "SUKA" Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan